

ABSTRAK

Penipuan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah yang melanggar kewenangan dan penyalahgunaan hak, walaupun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh yang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun diberlakukannya, namun masih banyak biro perjalanan umrah yang melakukan penipuan kepada calon jamaah umrah. Kasus penipuan terkait yang diteliti adalah mengenai tindak pidana penipuan yang memiliki unsur tujuan agar korban membayar sejumlah uang yang akan digunakan untuk biaya umroh yaitu dengan menggunakan profesi dan lembaga palsu (penyalur umroh) tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mengelabui korban.

Adapun masalah dalam kasus penipuan ini yaitu: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan jamaah umroh pada tahap penyidikan, Apa saja faktor penghambat kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jamaah umroh pada tahap penyidikan dan bagaimana solusi terhadap hambatan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan calon jamaah umroh pada tahap penyidikan pada penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang.

Metodologi yang digunakan peneliti adalah pendekatan secara empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan 3 penyidik di Sat Reskrim Polrestabes Kota Semarang. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa: (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umroh di Kota Semarang pada tahap penyidikan dilakukan melalui 3 tahapan yaitu pemeriksaan yang dilakukan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan dalam suatu tindak pidana, peninjauan tempat kejadian perkara yang terkait dengan lokasi dimana tersangka melakukan tindak pidana penipuan kepada para calon jamaah umroh yang dilakukan oleh tersangka, dan penyidikan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti. Yang ditemukan oleh aparat kepolisian. Penegakan hukum tindak pidana dengan menggunakan jalur penal atau upaya repressif dilakukan untuk memperkecil ruang gerak pelaku tindak pidana penipuan calon jamaah umroh serta kesempatan terjadinya kejahatan. (2) Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku penipuan calon jamaah haji yaitu koordinasi aparat penegak hukum itu sendiri, keabsahan biro perjalanan umroh, keserasian antara aparat hukum dan pihak imigrasi, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Berdasarkan penelitian ini terdapat 3 tahap penegakan hukum yaitu: a) tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana inabstracto oleh badan pembentukan undang-undang, tahap ini sering disebut tahap legislatif. b) tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, tahap kedua ini sering disebut tahap yudikatif. c) tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana, tahap ini sering disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Saran penulis masyarakat harus meneliti informasi seputar penyelenggaraan ibadah umroh yang diketahui terlebih dahulu baik dari orang maupun perusahaan dan pihak kepolisian harus selalu berkoordinasi dalam melakukan proses penyidikan terhadap laporan yang masuk dan tindak pidana atau kasus yang sedang dalam tahap penyidikan. Pemerintah juga harus melakukan pendataan Biro Jasa Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh.

Kata kunci: Penegakan hukum, Penyidikan, Penipuan Calon Jamaah Umroh

ABSTRACT

Fraud against the implementation of Umrah worship in violation of authority and abuse of rights, even though the government has issued Law Number 13 Year 2015 on Umroh Worship Implementation that has lasted for about 4 years, but there are still many Umrah travel agencies that commit fraud to prospective Umrah pilgrims. The related fraud case in question is about a criminal act of fraud which has an element - the goal for the victim to pay a sum of money to be used for the umroh fee by using fake professions or agencies (dealer umroh) tricks or lies to fool victims.

The problem in the case of this fraud is: How law enforcement against the perpetrators of fraud Umiq pilgrims at the stage of investigation, What are the factors inhibiting the police in the investigation of criminal acts of fraud of prospective pilgrims umroh at the stage of investigation and how the solution to police barriers in the investigation of criminal acts of fraud candidates Umroh congregation at the investigation stage at investigator Sat Reskrim Polrestabes Semarang.

The methodology used by researchers is the empirical approach. Adapaun source and data type in this research is primary data obtained from field study by interview with 3 investigators at Sat Reskrim Polrestabes Semarang City. And secondary data obtained from literature study.

Based on the results of this study: (1) Law enforcement against perpetrators of fraud in prospective cadre Umroh in Semarang City at the stage of investigation conducted through 3 stages of the examination conducted to the candidate suspects and positions that reinforce a report in a criminal act, cases related to the location where the suspect commits a crime against candidates of the umroh congregation committed by the suspect, and the investigation of the suspect, trans, and evidence. Found by the police. The enforcement of criminal law by using criminal or repressive means is done to reduce the space for committing suicide of umroh community and the opportunity of crime. (2) Inhibiting faktors of law enforcement against fraud perpetrators of the pilgrims are law enforcers themselves, the validity of travel agency umroh, harmony between law enforcement and the immigration, legal faktors, law enforcement faktors, facilities and supporting facilities, community faktors, faktors culture. Based on this research there are 3 stages of law enforcement namely: a) formulation stage is the stage of law enforcement inabstacto by the legislature forming body, this stage is often called legislative stage. b) application stage is the stage of criminal law enforcement by law enforcement officers ranging from the police, prosecutors to the courts, this second stage is often called the judicial stage. c) the execution stage is a concrete stage of criminal law enforcement by the criminal apparatus, this stage is often called the executive or administrative policy stage.

Suggestion of the writer of society must have information about the implementation of umroh worship which is known beforehand either from person or company and the police must always coordinate in process of investigation to report that enter and criminal act or case which is in investigation stage. The government should also conduct data collection of Bureau of Hajj and Umrah Service Providers.

Keywords: Law enforcement, Investigations, Umrah Jamaah Candidate Fraud